

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DENGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris Kabupaten / Kota Se-Pulau Jawa Tahun 2018 – 2020)**

**Feris Afan Iskandar<sup>1)</sup>, Andy Dwi Bayu Bawono<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

[ferisafan03@gmail.com](mailto:ferisafan03@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

[adbb122@ums.ac.id](mailto:adbb122@ums.ac.id)

***Abstract***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja fungsi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dengan belanja fungsi perlindungan sosial sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan kabupaten / kota Se-Pulau Jawa yang berjumlah 113 kabupaten / kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dapat dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pmdapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemiskinan. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Tingkat Kemiskinan. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial tidak dapat memoderasi hubungan dana alokasi khusus dengan Tingkat Kemiskinan. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan Belanja Fungsi Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan.*

***Keywords :*** *Pendapattan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Fungsi Pendidikan, Tingkat Kemiskinan, Belanja Fungsi Perlindungan Sosial*

**1. PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan (Rasu et al., 2019). Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara adalah melalui belanja negara yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) masing-masing daerah (Sihombing et al., 2022). Upaya dalam memberantas kemiskinan ini bisa dengan berbagai program dan kebijakan yang dibuat dengan pembiayaan-pembiayaan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pembiayaannya ialah melalui Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan dari pos-pos pontensi yang dikembangkan oleh daerah itu juga. Sumber PAD sendiri berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta

hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Fitriyanti & Handayani, 2020).

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan sendiri terdiri dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk menerima dana dari pusat untuk kepentingan daerah tersebut yang bertujuan sebagai biaya untuk lebih mensejahterakan masyarakat daerah tersebut dan merantas kemiskinan (Fitriyanti & Handayani, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai apa saja yang menjadi pengaruh dalam tingkat kemiskinan sudah banyak dilakukan. Ditemukan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan seperti yang dijabarkan oleh Nur Ika Fitriyanti, Herniawati Retno Handayani (2020), Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung, Rosalina A.M. Koleangan(2019), Risal Adriawan, Abdul Rahman, Baso Iwang (2022). DAU juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung, Rosalina A.M. Koleangan (2019), Risal Adriawan, Abdul Rahman, Baso Iwang (2022). Namun berbeda halnya dengan DAK yang pada penelitian keduanya menunjukkan hasil berbanding terbalik, pada penelitian Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung, Rosalina A.M. Koleangan (2019) berpengaruh positif sedangkan pada penelitian Risal Adriawan, Abdul Rahman, Baso Iwang (2022), Nur Ika Fitriyanti, Herniawati Retno Handayani (2020) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan seperti yang dijabarkan oleh Erliza Millenia Putria, Dewi Zaini Putria(2021), Annisa Marni Melati, Sudrajat, Dian Imanina Burhany (2021). Sedangkan pada penelitian Ervin Nora Susanti, Sartiyah (2019), Mhd. Rizki Syamsuri T, Agus Bandiyono (2018) berpengaruh positif. Pada penelitian yang sama menunjukkan hasil bahwa fungsi Perlindungan Sosial juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan pada penelitian yang dilakukan oleh Pardomuan Robinson Sihombing, Dwi Muslianti, Yunita (Sihombing et al., 2022) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Dilihat dari ketidakkonsistenan dalam beberapa penelitian terdahulu maka pada penelitian ini dilakukan pengujian kembali dan menyatukan 6 variabel yaitu PAD, DAU, DAK, Belanja Fungsi Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dalam sebuah judul. Maka dari itu, peneliti memberikan judul penelitian yaitu : “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Kabupaten / Kota Se-Pulau Jawa Tahun 2018 – 2020)”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan jumlah sampel sebanyak 323 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), Belanja Fungsi Pendidikan (BFP), Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS), dan Tingkat Kemiskinan pada tahun 2018-2020. Data terkait Laporan Realisasi APBD diperoleh melalui publikasi dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Sedangkan untuk data Tingkat Kemiskinan diperoleh melalui publikasi di website Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Pada penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA ini dilakukan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik), dengan rumus persamaan sebagai berikut:

Model regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Persamaan analisis regresi yang dimoderasi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5Z + b_6(X_1 \times Z) + b_7(X_2 \times Z) + b_8(X_3 \times Z) + b_9(X_4 \times Z) + e$$

Dimana:

- Y : Tingkat Kemiskinan  
a : Konstanta  
B 1-9 : Koefisien Regresi  
X1 : Pendapatan Asli Daerah  
X2 : Dana Alokasi Umum  
X3 : Dana Alokasi Khusus  
X4 : Belanja Fungsi Pendidikan  
Z : Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

##### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Stv. Dev
PAD	323	100745347096	5381920253810	569165063459.73	662224367347.446
DAU	323	351736779000	2149817107000	986835461405.77	338250330318.512
DAK	323	26626702999	1029119335346	311425305314.79	144394514718.039
BFP	323	164638395224	2802034551642	802102023502.14	424900979741.204
TK	323	1.68	20.71	9.6921	3.91620
BFPS	323	2861957099	320867502944	30151629072.43	27894186385.642
Valid N (listwise)	323				

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel analisis deskriptif di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp100.745.347.096 yang dimiliki oleh Kota Banjar tahun 2019. Nilai maksimum sebesar Rp5.381.920.253.810 yang dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2019. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 662.224.367.347,446 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Pendapatan Asli Daerah antar sampel penelitian yang

relatif jauh. Selain itu, nilai rata-rata PAD sebesar 569.165.063.459,73 secara keseluruhan bernilai positif dan dilihat dari 323 sampel cenderung mengalami kenaikan.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp351.736.779.000 yang dimiliki oleh Kota Banjar tahun 2020. Nilai maksimum sebesar Rp2.149.817.107.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung tahun 2019. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 338.250.330.318,512 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Dana Alokasi Umum antar sampel penelitian yang relatif jauh. Selain itu, nilai rata-rata DAU sebesar 986.835.461.405,77 secara keseluruhan bernilai positif dan dilihat dari 323 sampel cenderung mengalami kenaikan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp26.626.702.999 yang dimiliki oleh Kota Serang tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp1.029.119.335.346 yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul tahun 2020. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 1.443.945.147.180,39 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Dana Alokasi Khusus antar sampel penelitian yang relatif jauh. Selain itu, nilai rata-rata DAU sebesar 311.425.305.314,79 secara keseluruhan bernilai positif dan dilihat dari 323 sampel cenderung mengalami kenaikan.

Belanja Fungsi Pendidikan (BFP) memiliki nilai minimum sebesar Rp164.638.395.224 yang dimiliki oleh Kota Magelang tahun 2020. Nilai maksimum sebesar Rp2.802.034.551.642 yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi tahun 2018. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 424.900.979.741,204 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Belanja Fungsi Pendidikan antar sampel penelitian yang relatif jauh. Selain itu, nilai rata-rata BFP sebesar 802.102.023.502,14 secara keseluruhan bernilai positif dan dilihat dari 323 sampel cenderung mengalami kenaikan.

Tingkat Kemiskinan (TK) memiliki nilai minimum sebesar 1.68 persen yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 20.71 persen yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang tahun 2019. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 3.91620 persen menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Tingkat Kemiskinan antar sampel penelitian yang relatif jauh. Selain itu, nilai rata-rata TK sebesar 9.6921 persen secara keseluruhan bernilai positif dan dilihat dari 323 sampel cenderung mengalami kenaikan.

Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS) memiliki nilai minimum sebesar Rp2.861.957.099 yang dimiliki oleh Kota Magelang tahun 2020. Nilai maksimum sebesar Rp320.867.502.944 yang dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2019. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 424.900.979.741,204 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Belanja Fungsi Pendidikan antar sampel penelitian yang relatif jauh. Selain itu, nilai rata-rata BFPS sebesar 802.102.023.502,14 secara keseluruhan bernilai positif dan dilihat dari 323 sampel cenderung mengalami kenaikan.

## **Pembahasan**

Tabulasi data diolah dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 25, kemudian dihasilkan statistik deskriptif, tabel fixed effect untuk persamaan regresi, dan hasil uji T. Namun sebelumnya data telah melewati hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pada uji normalitas, saat pengujian regresi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan taraf signifikansi  $0,000 < 0,050$ , sedangkan pengujian persamaan analisis regresi termoderasi menggunakan CLT dan  $N \ 323 > 30$  agar data residual berdistribusi normal. Selama uji multikolinearitas tidak terjadi masalah multikolinearitas karena koefisien antara variabel tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Uji autokorelasi tidak ditemukan tanda-tanda autokorelasi karena nilai Durbin-Watson terletak antara -2 sampai 2 yaitu 1,626. Demikian juga dengan uji

heteroskedastisitas tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena hasil pengujian glejser pada persamaan 1 dan spearman's rho pada persamaan 2 memiliki nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji t**

Variabel	P	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig.	Kesimpulan	Keterangan	Jenis Moderasi
PAD	0,05	- 6,383	1,967	0,000	Signifikan	H <sub>1</sub> Diterima	
DAU	0,05	0,067	1,967	0,946	Tidak Signifikan	H <sub>2</sub> Ditolak	
DAK	0,05	4,057	1,967	0,000	Signifikan	H <sub>3</sub> Diterima	
BFP	0,05	- 0,532	1,967	0,595	Tidak Signifikan	H <sub>4</sub> Ditolak	
PAD*BFPS	0,05	- 0,588	1,967	0,557	Tidak Signifikan	H <sub>5</sub> Ditolak	Homologiser Moderation
DAU*BFPS	0,05	- 2,685	1,967	0,008	Signifikan	H <sub>6</sub> Diterima	Pure Moderation
DAK*BFPS	0,05	0,254	1,967	0,800	Tidak Signifikan	H <sub>7</sub> Ditolak	Homologiser Moderation
BFP*BFPS	0,05	2,581	1,967	0,010	Signifikan	H <sub>8</sub> Diterima	Pure Moderation

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 atau 5% dan nilai thitung -6,383 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,967. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi belanja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat dijadikan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rasu et al., 2019) dan (Fitriyanti & Handayani, 2020)

Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,946 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. dan nilai thitung 0,067 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,967. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. DAU ini sebagai bentuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, sehingga dapat mengondisikan tingkat kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2021).

Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 atau 5% dan nilai thitung 4,057 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,967. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap TK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. DAK dialokasikan kepada daerah untuk

membayai kebutuhan khusus yang mengarah terhadap pengalokasian dana ke kegiatan investasi pembangunan dan sarana prasarana. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Astuti et al., 2021) dan (Ambya et al., 2019).

Belanja Fungsi Pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,595 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5% dan nilai thitung -0,532 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,967. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel BFP tidak berpengaruh signifikan terhadap TK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Belanja pendidikan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Adanya biaya pendidikan dapat membantu menyejahterakan masyarakat dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu, sesuai dengan penelitian (Arifin, 2019).

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,557 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5 dan nilai thitung -0,588 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,967. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak, artinya Belanja Fungsi Perlindungan Sosial tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan Asli Daerah dengan TK. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial hanya berperan sebagai Homologiser moderation. Belanja Perlindungan Sosial akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Dana Alokasi Umum dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan nilai thitung -2,685 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,967. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H6 diterima, artinya Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan TK dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial hanya berperan sebagai pure moderation. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial yang telah pemerintah alokasikan dengan bentuk pemerataan dengan tingkat pendapatan dari belanja pegawai dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,800 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5% dan nilai thitung 0,254 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,967. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H7 ditolak, artinya Belanja Fungsi Perlindungan Sosial tidak dapat memoderasi hubungan dana alokasi khusus dengan tingkat kemiskinan dan belanja fungsi perlindungan sial hanya berperan sebagai Homologiser moderation.

Belanja Fungsi Pendidikan dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 yang berarti kecil dari 0,05 atau 5%. dan nilai thitung 2,581 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,967. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H8 diterima, artinya Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan belanja pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial berperan sebagai pure moderation.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Pedapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial sebagai Variabel Moderasi pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan.

4. Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
5. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemiskinan.
6. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Tingkat Kemiskinan.
7. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial tidak dapat memoderasi hubungan dana alokasi khusus dengan Tingkat Kemiskinan.
8. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan Belanja Fungsi Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 226–234. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10750>
- Ambya, Nairobi, & Rizqiandri, M. (2019). The Alleviation of Allocation Funding and Rural Poverty in Indonesia. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 2(2), 123–136. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v2i2.57>
- Arifin, N. F. K. (2019). Kredibilitas Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Kemiskinan (Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Ilmiah*, 7(2), 1–11.
- Astuti, S. Y., Basyah, M. A., & Niswah, F. M. (2021). The Effect of PAD, DAU and DAK on Poverty Rates in Java. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(5), 1668–1683. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.321>
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan ( Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). The Effects Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Poverty In Regencies And Cities In West Java. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Millenia, E., & Zaini, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di. *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(November), 106–114.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>

Sihombing, P. R., Muslianti, D., & Yunita. (2022). RETRACTION NOTICE TO “Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 236–243. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.12>

Susanti, E. N., & Sartiyah. (2019). Determinants of Poverty In The Riau Islands Province. *Dimensi*, 8(2), 249–265.